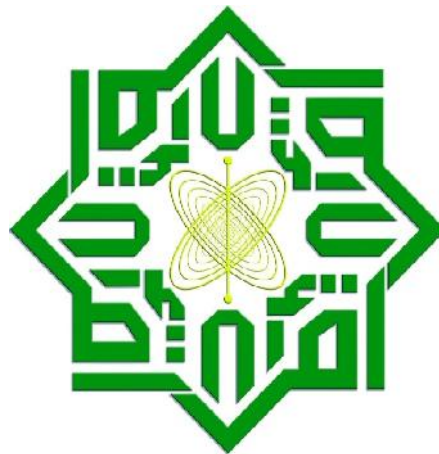


**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara
No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



**DEDE SETIADI
NIM : 10824002585**

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr).**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr tentang tindak pidana pencurian, bahwa menurut pasal 362 KUHP, siapa yang melakukan pencurian dihukum paling lama 5 tahun penjara. Namun dalam kenyataan pada kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr diputus hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Dalam hal ini apakah sebenarnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dalam kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr sehingga berbeda dengan ketentuan yang berlaku dan apakah dalam fiqih jinayah juga mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian kasus pencurian?

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr? dan bagaimana pula tinjauan fiqih jinayahnya terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr dan untuk mengetahui tinjauan fiqih jinayahnya terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang terletak di Jln. Teratai No. 85 Pekanbaru Riau. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yaitu yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus ini dan terdakwa itu sendiri, karena populasi dalam penelitian ini tidak terlalu banyak, maka dalam penelitian ini populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel seluruhnya.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dalam proses penyelesaian kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR, proses penyelesaiannya pada kasus tersebut dalam pemeriksaannya sudah memenuhi standar hukum jinayah, yaitu adanya pelaku, dengan niat sengaja, adanya saksi yang menyaksikan secara langsung, kemudian adanya pengakuan terdakwa adapun sekiranya hakim menetapkan hukuman dengan penjara 7 bulan penjara kepada terdakwa itu adalah bagian dari ijtihad. Kemudian juga dalam hal keputusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial dalam pandangan jinayah sudah sesuai, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut berdasarakan beberapa pertimbangan dan unsur- unsur pidana yang ada, jadi dapat dikatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kasus No.247/Pid/B/2011/PN/PBR telah mencerminkan keadilan dan ketepatan hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, pujian dan rasa syukur yang sebesar-besarnya khadirat Allah SWT yang telah membimbing mausia dengan petunjuk-petunjuknya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, petunjuk menuju jalan yang lurus dan diridhoiNya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Kemudian penulis juga bersyukur kepada-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: "***Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr.*** Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan penyelesaian studi strata satu (S1) guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan dan masih banyak pula kesalahan, untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Mulia ayahanda Rohana dan Ibunda Elim Halimah (almarhumah), kakanda Abun Sutisna, adinda Nenah serta keluarga besar ananda yang sangat berjasa dalam membimbing, memberi semangat, serta yang do'anya tidak terputus untuk anak-anaknya menjalar disetiap denyut nadi ananda membentuk partikel-partikel spiritual dan semangat sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi, dan

kepada seluruh keluarga yang banyak membantu, ananda rangkulkan sepuluh jari dan ucapkan ribuan terimakasih.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang banyak memberikan panutan selaku pemimpin, serta seluruh jajaran pegawai dan staf Fakultas Syari'ah yang telah melayani kami dengan sabar.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jinayah Siyasah H. Ismardi Ilyas, MA dan Bambang Hermanto, MA yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
5. Ibu Dra. Hj. Irdi Misraini, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan Ilmu, mengarahkan serta meluangkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Staf karyawan yang ada di Pengadilan Negeri tersebut yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi untuk kelancaran informasi ini.
7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Bapak Hendry Sayuti M.Ag, selaku penasehat akademis dan seluruh dosen fakultas Syari'ah terimakasih guru-guru kami jasa sungguh besar memberikan kami cahaya kebenaran.
9. Kepada teman-teman jurusan Jinayah Siyasah yang banyak memberikan semangat terutama kepada angkatan 2008' yang telah sama-sama merasakan perjuangan dalam satu barisan semoga kita semua selalu menuju kebaikan diri menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
10. Kepada Bapak Soleh dan Isteri yang sudah penulis anggap sebagai orang tua kandung ananda sendiri terimakasih atas semua bantuannya semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka amin.

11. Kepada sahabat ananda Rahmat Tamin, Saidi, Harfin Alpan, Ahmad Rizal, Akang Kosim, Rahmat Saputra, Muhammad Saufi yang telah membangkitkan semangat saya, terimakasih atas motivasinya semoga kita semua sukses.
12. Dan kepada seluruh orang-orang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan kuliah ini, penulis tidak bisa sebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kalian amien.

Hanya kepada Allah SWT penulis berdo'a dan bermohon semoga segala kebaikan dan jerih payah mereka semua mendapat balasan yang layak, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua amin.

Pekanbaru, 20 November 2012

Dede Setiadi

10824002585

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI	
A. Sistem Pengadilan Di Indonesia.....	9
1. Pengadilan Negeri.....	9
2. Pengadilan Militer.....	10
3. Pengadilan Agama.....	13
4. Pengadilan Tata Usaha Negara	15
B. Pengadilan Negeri dan Kewenangannya.....	16
1. Pengadilan Negeri.....	16
2. Kewenangan Pengadilan Negeri	17
3. Bagan Struktur Pengadilan Negeri	24
BAB III PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Pidana dan Hukum Pidana	30
B. Bentuk-Bentuk dan Pertanggungjawaban Pidana	32
C. Delik Pencurian dan Ancaman Hukumannya	46
1. Pengertian Pencurian.....	46
2. Ancaman Hukuman Pencurian.....	48
3. Kasus Pencurian Pada Kasus No 247/Pid/B/2011.....	53
D. Macam-Macam dan Unsur-Unsur Tindak pidana.....	54

BAB IV PELAKSANAAN HUKUM ACARA PIDANA PADA KASUS PENCURIAN No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR

A. Pemeriksaan	58
B. Penentuan Sanksi.....	78
C. Pemutusan Hukum	
a. Keserasian Keputusan Dengan Ancaman Hukuman.....	80
b. Alasan Pemutusan Hukuman.....	82
D. Kelemahan dan Ketepatan Hukum Acara Pidana dalam Kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Aspek hukum yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah. Hukum yang berhubungan dengan muamalah yaitu diantaranya adalah jinayah.¹ Adapun pengertian jinayah disini yaitu, *‘suatu perbuatan yang dilarang oleh syara; baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir*². Dalam fiqih jinayah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yaitu, unsur umum dan unsur khusus.³

Unsur umum adalah unsur-unsur yang berlaku untuk semua tindak pidana, dan yang termasuk dalam unsur umum, yaitu adanya *nash*, adanya perbuatan yang membentuk jarimah, kemudian adanya pelaku kejahatan adalah orang mukallaf.⁴ Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya di dapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya⁵. Salah satu tindak pidana yang harus memiliki unsur umum dan khusus adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah” *tindak*

¹. Ahmad Hanafi, *pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). h. 90

². Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) h. 1

³. H. M. Nasir Cholis, *Fiqih jinayah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), h. 2

⁴. Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 159

⁵. H. Ahmad Dzajuli, *Fiqih jinayah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2000), h. 3

*pidana pengambilan harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan tidak dipercayai menjaga barang-barang tersebut*⁶.

Jarimah pencurian ini dalam pidana Islam merupakan salah satu jarimah *hudud* yang ancaman hukumannya adalah *had* yang sudah ditentukan bentuk hukumannya dalam *nash*.⁷ Untuk dikenakan hukuman *had* ini pada pelaku jarimah pencurian banyak hal yang harus terpenuhi di dalam proses penyelesaiannya, antara lain: syarat-syaratnya, bukti-bukti, unsur-unsur serta hal-hal yang mempengaruhinya sehingga pelaku nanti apakah bisa dikenakan hukuman pokonya yaitu (potong tangan) atau kah dikenakan hukuman lain selain hukuman potong tangan⁸.

Sehubungan dengan hal tersebut, Islam Juga telah memberikan ketentuan mengenai pencurian ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Mutafaq Alaih yang berbunyi bahwasanya rasulullah pernah bersabda:

لعن الله السارق, يسرق البيضة, فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده.

Artinya: Allah melaknat pencuri telur, maka tangannya dipotong, dan orang yang mencuri seutas tambang, maka tangannya dipotong. (Mutafaq Alaih).⁹

⁶. Ibnu Rusd, *Bidayatul mujtahid Perjemahan*, Ahmad Haris Abdullah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), jilid x, h. 196.

⁷. Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah, Muhammad Yasir Abdul Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 701

⁸. Ibnu Rud, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah, Abu Usamah Fahtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 4, h. 907

Makna hadist menjelaskan betapa ruginya seorang pelaku tindak pidana pencurian karena perbuatannya itu sama dengan menganiaya dirinya sendiri, dan orang yang terbiasa mencuri barang yang kecil lambat laun kan berani mencuri barang yang besar (berharga), dan pada akhirnya tangannya akan dipotong karenanya.¹⁰

Sehubungan dengan ini pula, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan sebuah lembaga peradilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, telah banyak menyelesaikan kasus-kasus baik itu dalam hal perdata maupun dalam hal tindak pidana. Salah satu kasus tindak pidana yang di selesaikannya adalah kasus pencurian yang terdaftar No. perkara 247/Pid.B/2011/PN/PBR. Pelaku tindak pidana pencurian tersebut di lakukan oleh Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial hari Selasa tanggal 22 pebruari 2011 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengambil sesuatu barang, berupa satu buah dompet warna hitam merk sophie, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat korban mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa mengikuti dari belakang mendekati sepeda motor si korban tersebut dari arah samping kiri, dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil dompet yang berada di keranjang sepeda motor si korban dan terus melaju ke arah jl. Tanjung sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh massa.¹¹ Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara tersebut, telah memeriksa terdakwa Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial dengan seksama dan menuntut terdakwa dengan pasal

⁹. Al-Hafiz Syihabud Din Abul Fadl Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah, Bahrun Abubakar Ihsan Lc, (Bandung: Nuansa Aulia,, 2007), Jilid 3, h. 113

¹⁰. *Ibid.*

¹¹. Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri No. 247/ Pid. B/ 2011/PN /PBR, h. 3- 4

362 KUHP dan selanjutnya melimpahkan perkara tersebut kepengadilan Negeri Pekanbaru.

Di dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 362 KUHP yang termaktub dalam BAB XXII Buku ke II karena telah melanggar ketentuan di dalamnya, yaitu mengenai tindak pidana pencurian yang diancam dengan kurungan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900. Namun dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman 7 (bulan) penjara dan membayar ongkos perkara RP. 3000,-(tiga ribu rupiah).

Bila diperhatikan putusan hakim tersebut lebih rendah dari pada ketentuan yang diatur dalam KUHP terutama dalam pasal 362 itu sendiri. Apakah sebenarnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam kasus perkara NO. 247/Pid/B/2011/PN/PBR sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah di dalam jinayah juga mempunyai ketentuan–ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus pencurian?

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan pada proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pada kasus No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR dan tinjauan fiqih jinayah terhadap proses penyelesaian perkara pencurian No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian pada perkara kasus No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR. ?
2. Apakah keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kasus 247/Pid.B/2011/PN/PBR telah mencerminkan keadilan dan ketepatan hukum?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian pada perkara kasus No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR.
- b. Untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mendasari pengadilan untuk membuat keputusan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan penulis kepada masyarakat terutama mengenai penyelesaian kasus perkara No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Sebagai Referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang terletak di jln. Teratai No.85 Pekanbaru Riau. Pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh dari peneliti, sehingga menghemat biaya.

b. Subjek dan Objek Penelitian

- a). Subjek penelitian ini adalah pelaku atau siterdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian, sikorban dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus tersebut di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b). Objek penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pencurian perkara No. 247/Pid.B/2011/PN/PBR, di tinjau menurut fiqih jinayah.

c. Populasi dan Sampel

Adapun pihak yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus ini berjumlah 9 orang dan korban serta pelaku, jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 11 orang. Mengingat populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak banyak maka dalam penelitian ini populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel seluruhnya.

d. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang bersangkutan dalam kasus ini melalui wawancara dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan persoalan yang dibahas.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu turun langsung kelapangan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
- c. Studi dokumentasi.

f. Metode Analisa Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis mengutamakan metode yaitu sebagai berikut:

- a. Deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang dikemukakan , kemudian dianalisa secara teliti.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini lalu dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu menggambarkan keadaan secara khusus kemudian dianalisa dan dijelaskan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri, yang terdiri dari Sistem Pengadilan Di Indonesia. Pengadilan Negeri, Kewenangan Pengadilan Negeri, Bagan Struktur Pengadilan Negeri.

Bab III : Tinjauan umum tentang Pencurian dalam Hukum Pidana, yang terdiri dari Pengertian dan Hukum Pidana, Bentuk-bentuk pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Ruang Lingkup Hukum Pidana, Pengertian Delik Pencurian dan Ancaman Hukuman Pencurian, Macam-macam Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

Bab IV : Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Pada Kasus Pencurian No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR yang terdiri dari: Pemeriksaan, Penentuan Sanksi, Pemutusan Hukuman, Kelemahan dan ketepatan Hukum Acara Pidana Dalam Kasus No.247/Pid/B/2011/PN/PBR

Bab V : Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

TENTANG PENGADILAN NEGERI

A. Sistem Pengadilan Di Indonesia

Peradilan di Indonesia merupakan satu sistem, artinya peradilan di Indonesia harus dilihat , diterima dan diterapkan sebagai satu kesatuan yang tersendiri dari bagian-bagian yang tidak boleh bertentangan satu sama lain. Agar sistem itu terpelihara secara utuh, dibutuhkan penerapan asaa-asas hukum yang menjamin keutuhan sistem tadi. Sebagai contoh dikenal adanya asas *res judicata proveri tate habetur*, yang konsekuensinya adalah bahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap sah sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, dan bukan sebaliknya. Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945,¹ antara lain sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Sistem Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari–hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dan dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Perkara-perkara diadili oleh seorang hakim, yang dibantu oleh seorang panitera. Dalam perkara summier (perkara-perkara ringan

¹. R. Abdoel Djamali, SH. *Pengantar Hukum Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). h. 6

yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun) diadili oleh seorang hakim tunggal.

Daerah hukum pengadilan negeri pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat II. Pada pengadilan Negeri ada seorang kepala, seorang wakil kepala dan oleh beberapa orang hakim dibentuk oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera pengganti. Pengadilan Negeri dibentuk oleh menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera pengganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan.²

2. Sistem Pengadilan Militer

Peradilan Militer di Indonesia baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna peradilan Tentara. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 Peradilan tentara di bagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu :

1. Mahkamah Tentara
2. Mahkamah Tentara Agung.

². Drs. C.S.T. Kansil, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 338

Peradilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :

1. Prajurit Tentara (AD) Republik Indonesia, Angkatan laut dan Angkatan Udara
2. Orang yang oleh presiden dengan PP ditetapkan sama dengan prajurit
3. Orang yang tidak termasuk golongan (a) dan (b) tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan.

Pengadilan juga diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga, bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II KUHP yang dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya. Mahkamah Tentara merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka prajurit berpangkat Kapten ke bawah. Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat pertama dan terakhir untuk perkara :

1. Terdakwanya serendah-rendahnya berpangkat Mayor
2. Seorang yang jika dituntut di pengadilan biasa diputus oleh PT atau MA
3. Perselisihan kewenangan antara Mahkamah-mahkamah tentara

Mahkamah Tentara Agung pada tingkat kedua dan terakhir, mengadili perkara yang telah diputus oleh mahkamah tentara. Persidangan di pisahkan menjadi dua yakni persidangan untuk perkara kejahatan dan perkara pelanggaran. Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948, yang mengubah beberapa ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 ini mengatur peradilan tentara dengan susunan :

1. Mahkamah Tentara
2. Mahkamah Tentara Tinggi
3. Mahkamah Tentara Agung

Dengan demikian sistem peradilan dua tingkat yang diatur sebelumnya berubah menjadi tiga tingkat, dengan masing-masing kewenangan;

1. Mahkamah Tentara, mengadili dalam tingkat pertama kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan prajurit berpangkat kapten ke bawah
2. Mahkamah Tentara Tinggi, pada tingkat pertama mengadili prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Pada tingkat kedua memeriksa dan memutus segala perkara yang telah diputus mahkamah tentara yang diminta ulangan pemeriksaan.
3. Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat pertama dan terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Besar, Kastaf Angkatan Perang, Kastaf Angkatan Darat, Kastaf Angkatan Laut, Kastaf Angkatan Udara, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Komandan

Teritorium Jawa, Komandan Teritorium Sumtera, Panglima Kesatuan Reserve Umum, Kastaf Pertahanan Jawa Tengah dan Kastaf Pertahanan Jawa Timur.³

3. Sistem Pengadilan Agama

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi dengan dikeluarkannya keketapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa seluruh sistem pembinaan peradilan disatukan dalam wadah Mahkamah Agung, seraya dengan hal tersebut, disana-sini timbul keraguan dipelbagai starta mengenai kedudukan dan wewenang peradilan agama tadi. Hal ini nampak jelas di Instansi Departemen Agama yang khawatir kehilangan kendali administratif atas lembaga Pengadilan Agama.⁴

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefenisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga

³. Salam, Faisal. *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: Mandar Majunad, 1997). h. 57

⁴. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH. MA , *Pengadilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 126

jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang selama ini sering terjadi titik singgung kewenangan mengadili.

Jika terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih dimana yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama, maka tata cara penyelesaian sengketanya dapat ditempuh dengan solusi sebagai berikut:

1. Pihak berperkara atau dalam hal ia tidak mengajukannya, maka Ketua Pengadilan Agama karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kewenangan mengadili.
2. Apabila permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh Ketua Pengadilan Agama karena jabatannya, maka Pengadilan Agama/Majelis Hakim yang bersangkutan harus menunda pemeriksaan perkara tersebut yang dituangkan dalam bentuk “PENETAPAN”, sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.⁵
3. Pengadilan Agama yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama.
4. Pengadilan lain yang menerima salinan “PENETAPAN” penundaan tersebut, harus pula menunda pemeriksaan perkara dimaksud sampai dengan sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

⁵. *Ibid.* h. 169

Sedangkan untuk terjadinya sengketa kewenangan mengadili antar dua Pengadilan atau lebih yang sama-sama menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama. Dalam pengajuannya, ia (pemohon/ pihak berperkara) dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya perkara.

4. Sistem Pengadilan PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan ini juga harus memperhatikan kebenaran-kebenaran tersebut untuk mencapai keadilan. Demikian pula para anggota yang duduk dalam lembaga ini harus mempunyai keadilan khusus untuk itu dan terutama sekali mempunyai pengetahuan hukum yang cukup luas. Pada masa Hindia Belanda tidak dikenal adanya Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang dikenal dengan Sistem administrasi bereop. Hal ini terurai dalam pasal 134 ayat (1) IS yang berisi:

1. Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-undang
2. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga itu sendiri.

Kemudian , setelah Indonesia merdeka yaitu pada masa UUDS 1950 , dikenal tiga cara penyelesaian sengketa administrasi yaitu :

1. Diserahkan kepada Pengadilan Perdata;
 2. Diserahkan kepada Badan yang dibentuk secara istimewa.
 3. Dengan menentukan satu atau beberapa sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Perdata atau Badan Khusus.
- Perubahan mulai terjadi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman . dimana pada pasal 10 nya menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan antara lain Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶

B. Pengadilan Negeri, Kewenangan dan Bagan Strukturnya.

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri ini dibentuk dengan keputusan Presiden Adapun Pimpinan Pengadilan terdiri dari seseorang Ketua dan wakil ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung dan pembinaan serta pengawasan yang dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.⁷

Kemudian juga untuk menjadi seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

⁶. H. Rozali Abdullah, SH, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95

⁷. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, *Op.Cit.* h. 336

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 RI.
4. Sarjana Hukum
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Berumur 25 Tahun
7. Berwibawa, Jujur adil dan berkelakuan baik.
8. Bukan bekas organisasi terlarang partai komunis.
9. Harus pegawai Negeri berasal dari calon Hakim.
10. Ketua atau wakil ketua mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan negeri.⁸

2. Kewenangan Pengadilan Negeri

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang itu sebahagian diatur dalam pasal 84,85,86.

Pasal 84

Baiklah penulis akan menyebutkan ayat-ayat dari pasal 84 tersebut, yaitu:

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya

⁸. *Ibid*, h.338

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberpa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan Ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Maksud ayat 1 di atas adalah untuk menegaskan Pengadilan mana Yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti ini disebut kewenangan *relatife* atau *distributie van rechtsmacht*. Bila ayat 1 di atas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri wilayah tindak pidana itu dilakukan. Terbatas di sini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2.

Ayat 2 di atas merupakan pembatasan/ pengecualian dari pada ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

Atas ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini masih memerlukan penjelasan dan operasionalisasi lebih lanjut, karena ketentuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan terjadinya *Jurisdictie Geschil* yaitu persengketaan yurisdiksi secara potensial dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi permasalahan masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan.

Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Pasal 85:

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam penjelasan tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Pasal 86:

Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri, yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang berwenang mengadilinya. Pasal 86 di atas menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menganut *asas personalitas aktif* dan *asas personalitas pasif*, yang memberi kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya Peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.⁹

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilan Negeri itu adalah:

1. Wewenang Mutlak (*Kompetensi Absolut*).

Wewenang mutlak yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), maupun dalam lingkungan Peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Jadi kompetensi Absolut ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu pengadilan.

2. Wewenang Nisbi (*Kompetensi Relatif*).

Wewenang nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan?. Pertanyaan ini menyangkut dengan

⁹. Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Sinar Grafika, 1996), h. 39-40

pembagian kekuasaan kehakiman (Distribusi Kekuasaan Kehakiman).
 Ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada hakim Kompetensi relatif diatur dalam pasal 118 (pasal 142 RBG) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat berdomisili), yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBG), dimana gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang nyata, maka gugatan diajukan pada pengadilan di tempat tergugat sebenarnya tinggal (pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG). Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (pasal 4 Undang – undang No. 2 Tahun 1996).

Dari keterangan di atas dijelaskan pula bahwa daerah hukum pengadilan negeri meliputi daerah tingkat II maka wewenang dari Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah meliputi daerah tingkat I kota madya Pekanbaru yang terdiri dari delapan kecamatan:

1. Sukajadi
2. Pekanbaru Kota.
3. Sail.

4. Lima Puluh.

6. Senapelan.

7. Tampan.

8. Bukit Raya.

Dengan demikian maka perkara yang terjadi dalam daerah tingkat II Pekanbaru merupakan wewenang dari pengadilan Negeri

Kemudian tentang berdirinya pengadilan Negeri Pekanbaru. ,Pembentukan kota madya pekanbaru ini sebagai ibu kota propinsi daerah tingkat 1 Riau, sebelumnya telah melalui sejarah yang panjang, proses bermula dari sebuah dusun kecil yang terletak dipinggir sungai Siak yang disebut dengan nama Payung Sekaki. Dusun ini disebut Senapelan.¹⁰ Dusun Senapelan mengalami perkembangan pada kerajaan Siak Sri Indrapura, sebab ia merupakan bagian dari kerajaan Siak Sri Indrapura itu sendiri. Dengan perkembangan yang begitu pesat sehingga membutuhkan tempat transsaksi (pekan atau pasar) untuk melakukan kegiatan jual beli sekali dalam satu pekan atau satu minggu¹¹. Karena jumlah hari satu minggu itu tujuh hari dan diantara yang tujuh itu diadakan hari pekannya, maka dinamakanlah pelaksanaan hari pekan transaksi itu dengan pekan. Kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alimuddin Syah (wafat tahun 1791) beliau digantikan oleh putranya sendiri yang bergelar Sultan Muda Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah. Niat Sultan Muda ini untuk mewujudkan kembali pekan di dusun Senapelan tidak dapat dilahirkan dalam

¹⁰. Dokumentasi Pengadilan Negeri, 1997, h. 2

¹¹. *Ibid.*

waktu relatif singkat. Kendati demikian kegigihan beliau- dapat mewujudkan kembali pekan tersebut walaupun tidak tepat pada tempat semula tetapi sudah beralih tempat sekitar pelabuhan sekarang.

Berdasarkan keterangan almarhum Suhail, pekan yang didirikan itu 12 Rajab 1202 H, hari Selasa menurut bulan masehinya jatuh pada tanggal 23 Juni 1781 M. oleh karena bangunan yang baru dibuat nama Pekanbaru, kemudian pada tanggal itu diberi nama hari lahirnya kota Pekanbaru¹². Dengan pesatnya perkembangan pekanbaru tersebut sehingga masyarakat sudah banyak dan menginginkannya suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara yang dinamakan pengadilan, maka pada tahun 1050 didirikan suatu lembaga penegak keadilan yang bernama Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah tingkat II di kota Madya Pekanbaru, di jalan Teratai sehingga lebih dikenal dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru seiring dengan pemindahan kota propinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kemudian dari tahun 1950 hingga menjelang 1982 propinsi Riau belum mempunyai Pengadilan Tinggi sendiri, oleh sebab itu bila terjadi kasus sampai ketingkat banding maka hal ini diselesaikan di Padang. Setelah tahun 1982 barulah propinsi Riau memiliki Pengadilan Tinggi sendiri, yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman¹³.

2. Bagan Struktur Pengadilan Negeri

¹². *Ibid* , h. 4

¹³. Syaiful Azwir, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2012

Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai tiga ruang sidang memeriksa perkara, antara lain ruang sidang induk yang biasa digunakan untuk memeriksa perkara pidana, sedangkan dua lainnya dipergunakan untuk memeriksa perkara perdata. Adapun pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengalami perubahan dan penggantian ketua sebanyak empat belas kali pergantian yaitu:

1. Tahun 1950 – 1960, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sulaiman, SH.
2. Tahun 1960 - 1965, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Zaidir Lamid, SH.
3. Tahun 1965 - 1972, ketua Pengadialan Negeri dijabat oleh Abdul Jalil, SH.
4. Tahun 1972 – 1981, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Wajiahar Harakam, SH.
5. Tahun 1981 – 1983, ketua Pengadialan Negeri dijabat oleh Syamsul Bahri, SH.
6. Tahun 1983 – 1987, ketua Pengadilan negeri dijabat oleh Ida Bagus Adniyana, SH.
7. Tahun 1987 – 1990, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Setyo Harsono, SH.
8. Tahun 1990 – 1993, ketua pengadilan Negeri dijabat oleh Achmadi, SH.
9. Tahun 1993 – 1995, ketua pengadilan Negeri dijabat oleh Arzan Yahya, SH.
10. Tahun 1995 – 1996, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Yusuf Thoha, SH.
11. Tahun 1996 – 1999, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sarmin, SH.
12. Tahun 2000 – 2001, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Asmal Abdullah, SH.
13. Tahun 2002 – 2003, ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Asmal, SH.
14. Tahun 2003 - 2007 ketua Pengadilan Negeri dijabat oleh Sumantri, SH.
15. Tahun 2007 sampai sekarang Ketua Pengadilan Ngeri dijabat Oleh Muefri SH, MH

Berkenaan dengan jumlah Hakim selalu berubah-ubah dari tahun pertama berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai sekarang ini, yang bertugas menyelesaikan perkara, baik perkara perdata maupun pidana.

Sedangkan jumlah hakim sekarang yang menangani pidana dan perdata berjumlah 12 orang, yaitu:

1. Muefri SH, MH sebagai Hakim Ketua
2. Ida Bagus Dirgantara SH, Mhum sebagai Wakil Ketua.
3. H. Jahuri Efendi, SH
4. Saiful Azwir, SH
5. I Ketut Suarta, SH
6. Poltak Pardede, SH
7. Jhon Pantas L. Tobing, SH, Mhum
8. Krosbin Lumban Gaols, SH, MH
9. Togi Pardede, SH
10. Masrijal, SH, MH
11. Pasti Tarigan ,SH, MH
12. Isnurul S. Arif, SH, MhuM

Adapun struktur kepanitraan/ kesekretariatan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai beriku:

TABEL I
STRUKTUR KEPANITERAAN / KESEKTERIATAN PENGADILAN
NEGERI KELAS I B PEKANABRU

NO	NAMA	JABATAN
01	H. Mahtum Saadiah,, SH, MH	Panitera Sekretariat
02	Samsul Febri, SH	Wakil Sekretariat
03	Efrizal, SH	Panitra Muda Pidana
04	Hj. Des Surya, SH	Panitera Muda perdata
05	Amirin, SH	Panitera Muda Hukum
06	Yurnida, SE	Kasub Bag Keuangan
07	Misti Hutapea, SmHk	Urusan Kepegawaian
08	Arlan Parnaungan, SH	Kasub Bag Umum
09	Hj. Marlianis, SH	Panitera Penggaanti
10	Hendri Ruspianto, SH	Juru Sita

Sumber Data: Pengadilan Negeri

Tugas penyelenggaraan administrasi ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dibantu oleh kepala kepaniteraan sebagai penanggung jawab pelaksanaan administrasi umum serta bendaharawan yang ada di Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam pelaksanaan administarasi umum dibantu oleh kepala kepaniteraan perkara. Kepala kepaniteraan perkara dalam pelaksanaannya dibantu oleh:

1. Kabag perdata yang bertugas meregister perkara perdata.
2. Kabag pidana yang bertugas meregister perkara pidana.
3. Kabag statistik dan dokumentasi bertugas antara lain:
 - a. Membuat laporan bulanan, kwartal dan tahunan perkara pidana maupun perkara perdata.
 - b. Statistic, grafik dan arsip yang terdiri dari:
 - 1) Bendahara umum.
 - 2) Bendahara rutin.
 - 3) Bendahara proyek.

Di bidang peradilan, ketua pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua dan beberapa orang hakim. Khusus di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada 15 orang hakim termasuk ketua pengadilan bertugas keluar kota, ketua pengadilan melimpahkan tugas-tugasnya kepada wakil ketua pengadilan. Kepala pengadilan sebagai administrasi pengadilan berwenang menentukan biaya perkara di Pengadilan. Adapun biaya perkara tersebut ditentukan oleh ketua pengadilan dengan periode sekali dalam setahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan perkara di pengadilan Negeri Pekanbaru dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Sebelum perkara diajukan.

Sebelum perkara diajukan, seseorang yang ingin berperkara secara berperiode lebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Permohonan itu diperiksa oleh ketua pengadilan, dengan adanya bukti seperti surat keterangan miskin yang diberikan oleh lurah atau kepala desa setempat, maka kemudian dibuat

penetapan untuk berperkara secara berperiode. Penetapan tersebut nantinya merupakan dasar bagi pihak penggugat untuk mengajukan dan mendaftarkan perkara di kepaniteraan.

2. Bersamaan dengan gugatan.

Jika diajukan sekaligus dalam gugatan, maka terlebih dahulu diperiksa permintaan penggugat untuk berperkara secara berperiode. Dengan memanggil tergugat pihak lawan. Jika pihak lawan keberatan atas permintaan penggugat tersebut maka pihak lawan membuktikan bahwa penggugat itu adalah orang mampu. Berlainan dengan perkara pidana, yang mana apabila seseorang terdakwa dijatuhkan di persidangan, yang didapat dengan hukuman 5 (lima) tahun, dapat memperoleh bantuan hukumnya disebabkan oleh pemerintah. Untuk Pengadilan Negeri Pekanbaru, biaya perkara diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi ongkos perkara tetap dibayar terdakwa, yang dalam hal ini diminta oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai eksekutornya.

Penentuan hakim yang akan menyidangkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditentukan oleh ketua pengadilan, dan untuk ketua majelis ditentukan berdasarkan senioritasnya, kepangkatan maupun pengalamannya. Majelis hakim yang telah mendapatkan untuk memeriksa perkara dan tidak dicampuri oleh sesuatu kekuatan manapun. Hakim mempunyai hak untuk menentukan perkara yang ditanganinya dan ketua Pengadilan Negeri secara langsung tidak dapat mengawasi maupun menindak hakim jika ada tunggakan perkara.

Biaya – biaya yang diperlukan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengajukan perkara, antara lain:

1. Biaya pendaftaran surat kuasa.
2. Biaya praskot sita.
3. Biaya putusan.
4. Biaya eksekusi.
5. Biaya pemungutan uang.
6. Biaya surat bukti.
7. Biaya pemeriksaan di lapangan.¹⁴

Demikianlah cara perkara secara priode Pengadilan Negeri Pekanbaru secara teratur dan terorganisir dengan baik.

¹⁴. *Ibid*

BAB III

PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Pidana dan Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana secara bahasa yang dijumpai dalam Kamus Hukum, adalah *“suatu Hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman”*.¹ Pidana bisa disebut juga dengan *“peristiwa pidana”* atau *“delik.”*. Sedangkan menurut istilah pidana adalah *“ semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana”*. Selanjutnya menurut Mr. Tresna pidana yaitu *rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman*².

Sedangkan dalam kepustakaan Islam, Pidana Islam sering diistilahkan dengan *“Jinayah”* atau *Jarimah*”. Jinayah menurut kamus Al-Munawwir adalah *“Perbuatan buruk, perbuatan jelek atau perbuatan dosa.”*³ Pengertian Jinayah secara bahasa ialah *“Suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang”*⁴. Sedangkan Pengertian *jinayah* dalam istilah ilmu fikih ialah *“ Suatu perbuatan*

¹. Drs. Marwan, SH. Dan Jimmy P. SH, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009). h. 510

². Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2004), h. 10

³. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 605

⁴. Prof. K.H. Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 87

*yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya”.*⁵

Kemudian definisi *Jarimah* secara bahasa ,artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. sedangkan menurut Rahmat Hakim adalah “*perbuatan buruk, perbuatan dosa, atau perbuatan jelek*”.⁶ Sedangkan *Jarimah* secara istilah ialah “*perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau ta’zir*”⁷

Dari definisi yang dipaparkan tersebut di atas maka penulis berkesimpulan bahwa antara jinayah dan jarimah memiliki makna yang sama secara bahasa yaitu sama-sama perbuatan dosa, perbuatan kesalahan atau perbuatan jelek. Kemudian secara istilah jinayah dan jarimah mempunyai makna yang sama pula yaitu sama-sama menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang apabila dilanggar maka para pelakunya akan dikenakan hukuman baik hukuman had maupun hukuman ta’zir.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana menurut kamus hukum yaitu peraturan hukum mengenai pidana” Hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelangagarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.⁸ Sedangkan menurut Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah

⁵. *Ibid.* h. 88

⁶. Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Fustaka Setia, 2000), h. 13

⁷. Prof. K. H. Alie Yafie, *Op. Cit.*, h. 7

⁸. Drs. Marwan, S.H. dan Jimmi, S.H. *Op.Cit.* h. 269

keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Kemudian menurut Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.⁹

Adapun pengertian hukum pidana dalam Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis.¹⁰

Dari definisi di atas maka penulis dapat mengambil intisari bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang isinya berupa larangan maupun keharusan yang harus di patuhi sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan terebut dikenakan saknsi yang telah ditentukan dalam hukum pidana tersebut.

B. Bentuk-bentuk Pidana Pertanggung Jawaban Pidana dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Bentuk-bentuk Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan bentuk-bentuk pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua

⁹. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, MH. *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

¹⁰. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992), h. 86

pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri empat bentuk pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga bentuk pidana.

Bentuk-bentuk pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Meliputi

1. Pidana Mati adalah bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik atau kejahatan berat.
2. Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.
3. Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.¹¹

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Pidana denda teardapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda di jatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran kejahatan ringan.¹²

b. Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.

¹¹. A .Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 283

¹². *Ibid.* h. 296

2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.¹³

Kemudian dalam fiqih jinayah juga pidana (jarimah) dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman jarimah dapat dibagi menjadi kepada tiga bagian antara lain:

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah – jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberotakan,, jarimah pencurian, jarimah minuman keras.
2. Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qisas dan diat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

¹³. Bambang Waluyo, SH, *Pidana danPemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10

3. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁴

b. Di tinjau dari segi niatnya.

Di tinjau dari segi niatnya, pidana (*jarimah*), itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Pidana (*jarimah*) sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. Pidana (*jarimah*) tidak sengaja, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya: seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing) akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.¹⁵

c. Ditinjau dari segi objeknya.

Ditinjau dari segi objeknya atau sasaran yang terkena oleh pidana (*jarimah*), maka jarimah itu dapat dibagi dua bagian, yaitu :

1. Pidana (*jarimah*) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk dilindungi hak perseorangan (individu), Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.

¹⁴.H. Ahmad Dzajuli ,*Op.Cit.* h. 23

¹⁵. *Ibid*, h. 24

2. Pidana (*jarimah*) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk dilindungi kepentingan masyarakat, Misalnya: pembunuhan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.¹⁶

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

Ditinjau dari segi melakukannya, jarimah dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang di larang, seperti mencuri, zina dan pemukulan.
2. Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.¹⁷

e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Di tinjau dari segi motifnya, pidana (*jarimah*) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

1. Pidana (*jarimah*) biasa, yaitu pidana (*jarimah*) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya : mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.
2. Pidana (*jarimah*) politik, yaitu pidana (*jarimah*) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya : pemberontakan bersenjata, dan sebagainya.¹⁸

¹⁶. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 25

¹⁷. *Ibid*,

¹⁸. *Ibid*

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya , seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat
- c. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya¹⁹

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian dalam peraktek peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut tidaklah mudah. Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “ tidak mampu bertanggung jawab” yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepanya. Alasannya tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumusan dengan perkataan “ jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Ada beberapa hal penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja sehingga mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk

¹⁹. Bambang Waluyo, S.H. *Op. Cit.* h. 86

sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya. penyakit jiwanya antara lain:

- a. *Kleptomania*; orang yang dihinggapai penyakit jiwa ini tidak dapat menahan dorongan untuk mengambil barang orang lain, dan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang.
- b. *Nymphomania* : orang berpenyakit jiwa demikian ini bila berjumpa dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh.
- c. *Claustrophobia* : penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada ditempat sempit atau gelap.²⁰

Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam fiqih jinayah adalah : “*Pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu*”.²¹

Dalam fiqih jinayah pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.²²

²⁰. *Ibid.* h. 90

²¹. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* h. 74

²². *Ibid*

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak terdapat pula pertanggungjawaban.dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban²³.

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan oang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Faathir ayat 18 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَمْوَالَهُمْ لِبُحُولٍ خَالِدَةٍ وَأَنْ يَسْعَوْا فِي السُّبُلِ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾

Artinya : “seseorang tidak menanggung dosa orang lain”²⁴

Surat An-Najm ayat 39, yang berbunyi :

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ عَنْهُ وَمَا يُبْدِي لَهُمْ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ إِنْ يَكُونُوا رَأْيًا عَنِ الْغَيْبِ إِلَّا خَبْرًا ۚ﴾

Artinya :” dan tidak ada bagi Manusia kecuali apa yang ia usahakan”²⁵.

Surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi :

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ عَنْهُ وَمَا يُبْدِي لَهُمْ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ إِنْ يَكُونُوا رَأْيًا عَنِ الْغَيْبِ إِلَّا خَبْرًا ۚ﴾

²³. Ibid

²⁴. Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 437

²⁵. Ibid. h. 528

Artinya : “barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barang siapa

a. Sengaja (Al-‘Amdu)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai sengaja (*Syibhul ‘Amd*)

Pengertian syibhul ‘Amd adalah dilakukanya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabanya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (Al-Khata’)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu :

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tertidur di samping seorang bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati²⁶.

Pertanggungjawaban pidana dalam Fiqih Jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu di bolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman²⁷.

Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman, yaitu:

- a. Paksaan.

²⁶. Drs. H. Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit.* h. 77

²⁷ *Ibid* , h. 85

Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

b. Mabuk.

Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum-minuman keras atau khamar atau sejenisnya.

c. Gila.

Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.

d. Dibawah umur.

Adapun criteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam Fiqih Jinayah, adalah sebagai berikut :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum Tamyiz, Karena belum mencapai usia 7 (tahun), apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak dikenakan Qishash apabila ia melakukan jarimah Qishash.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia Sembilan belas tahun (baligh). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, Qishash maupun

ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia dianggap sebagai pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia delapan belas tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya²⁸.

Dengan demikian orang gila, orang yang dipaksa, orang mabuk dan anak dibawah umur tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang berbunyi :

لله عنها قالت : ، رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أثم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأ و عن الصّدِّ

يكبر.

²⁸. *Ibid*, h. 117-135

Artinya: “ dari Aisyah ra berkata: telah bersabda Rasulullah saw: dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia senbuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa²⁹ “. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud).

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan didasarkan pada unsur kesalahan. Oleh karena itu unsur – unsur pidana mencakup:

1. Sikap tindak/perilaku manusia, misalnya: mencuri, menganiaya dan sebagainya.
2. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembedaannya. Misalnya: membunuh, kecuali dia gila atau dalam keadaan memaksa yang tak dapat dielakan.
3. Kesalahan, kecuali ada peniadaan kesalahan. Misalnya: melanggar ketentuan lalu lintas.

Akhirnya jenis – jenis Hukum Pidana yang dikenal menurut pasal 11 KUHP Pidana adalah:

²⁹. *Ibid*, h. 75

1. Hukum Pokok, misalnya: penjara, kurungan atau denda.
2. Hukuman Tambahan, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang – banrang tertentu.³⁰

Adapun Ruang lingkup hukum pidana dalam Fiqih Jinayah meliputi pencurian, perzinahan, (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*al-qadzaf*), meminum minuman memabukan(*khamar*), membunuh dan atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukuman kepidanaan.³¹ Hukum kepidanaan dimaksudkan disebut jarimah. Jarimah terbagi dua,yaitu Jarimah hudud dan jarimah ta'zir .Kata *Hudud* berasal dari bahsa Arab adalah jamak dari kata *had* ,*hudud* adalah *hukuman -hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan - larangan tertentu. Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti anantara lain batasan atau definisi ,siksaaan,ketentuan atau hukum. Had dalam pembahasan fikih(hukum islam) adalah ketentuan tentang saksi terhadap pelaku kejahatan,berupa siksaan fisik atau moral sedangkan menurut syariat islam ,yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al - Quran ,dan atau kenyataan yang dilakukan oleh Rassullah saw. Tindakan kejahatan yang dimaksud baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok ,sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan Jarimah.Jarimah hudud adalah tindakan kejahatan

³⁰. Bambang Waluyo, *Op. Cit.* h. 19

³¹. Prof. Dr. H. Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafaika, 2007), h. 9

yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenai sanksi *had*.³²

Hukum pidana Islam dikenal dengan delik Qishah. Secara harfiah artinya membalas atau memotong. Qishah yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diat (denda) dalam bentuk harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukann.³³

C. Delik Pencurian, Ancaman Hukuman dan Kasus Pencurian Pada Kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR

1. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut *kamus besar bahasa Indonesia* bahwa pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam³⁴. Kemudian menurut istilah Pencurian adalah “*Mengambil milik barang orang lain tanpa izin atau dengan cara yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.³⁵

Sedangkan dalam fiqih jinayah beberapa ahli mendefinisikan pencurian diantaranya adalah Menurut Ibnu Rusd, dalam bukunya *Bidayatu’l Mujtahid* mendefinisikan Pencurian adalah “*Mengambil barang orang lain secara*

³². *Ibid* . h . 11

³³. *Ibid*. h. 10

³⁴ Hamzah Ahmad, Ananda Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: fajar Mulya 1996), h. 85

³⁵. Drs. M. Marwan, SH. Dan Jimmi P. *Op. Cit.* h. 499

sembunyi-sembunyi tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut".³⁶ Kemudian Jaenudin Ali mendefinisikan pencurian yang dikutip dalam buku Penjelasan Lengkap Hukum Allah yang dikarang oleh A. Rahman menyatakan pencurian adalah "*mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam – diam untuk dimiliki*". A. Rahman I, dalam bukunya Penjelasan lengkap Hukum Allah, *Sariqah* (pencurian) adalah "*cara yang tidak sah mengambil harta orang lain*".³⁷

Sedangkan pencurian menurut syara adalah "*pengambilan oleh seseorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal), dari tempat sipanannya, tanpa ada subhat dalam barang yang diambil tersebut*".³⁸

Dari definisi di atas maka penulis dapat mengambil intisari bahwa pencurian adalah mengambi barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum.

2. Ancaman Hukuman Pencurian

Ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum positif itu temuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termaktub dalam BAB XXII Buku ke II diantaranya dalam pasal: 362, 363

³⁶. Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, M.A Abdurahman, (Semarang, CV. Asy-Syifa, 1990) Jilid 3, h 647

³⁷. A. Rahman, *Penjelasan lengkap Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.. 188

³⁸. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005) , h. 82

Pasal 362

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900_³⁹

1. Ini adalah pencurian biasa. Elemen-elemennya sebagai berikut:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Yang diambil harus suatu barang
 - c. barang itu harus, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
 - d. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk „memiliki” barang itu dengan melawan hukum”
2. Mengambil barang untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan merupakan pencurian tetapi penggelapan (pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
3. Suatu barang segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang masuk pula”daya

³⁹. R. Soenarto Soerodibroto, S.H, *KUHUP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006). h.

listrik'' dan,,gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang - kenangan semisalnya) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

4. Barang itu'' seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain''. Sebagian punya orang lain misalnya. A bersama B membeli sebuah sepeda , maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan diruma A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang - barang yang sudah dibuang oleh yang punya dll.⁴⁰

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan bermaksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang-barang lain itu bukan pencurian. Seorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka termasuk pencurian.

Pasal 363:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

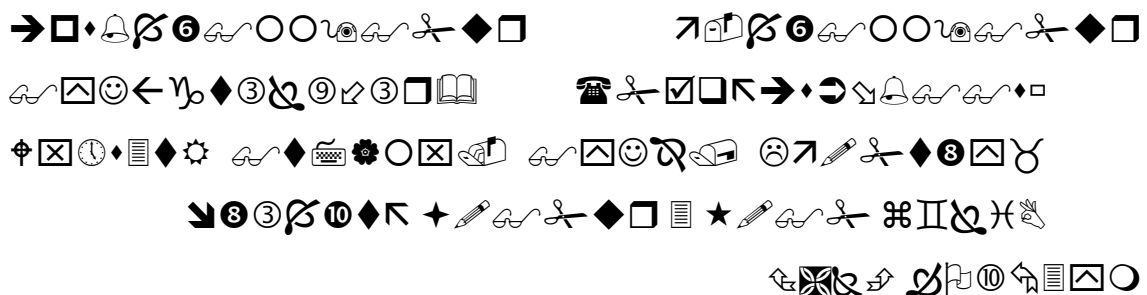
a. pencurian ternak.

⁴⁰. Salahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara pidana, dan Perdata*, (Jakarta: Trasnmedia Fustaka, 2008), h. 86

- b. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.
- c. Pencurian dilakukan oleh dua orang.
- d. Pencurian waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi.
- e. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak.

(2). Jika pencurian yan diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke -4 dan -5, maka dikenakan pidana 9 tahun.⁴¹

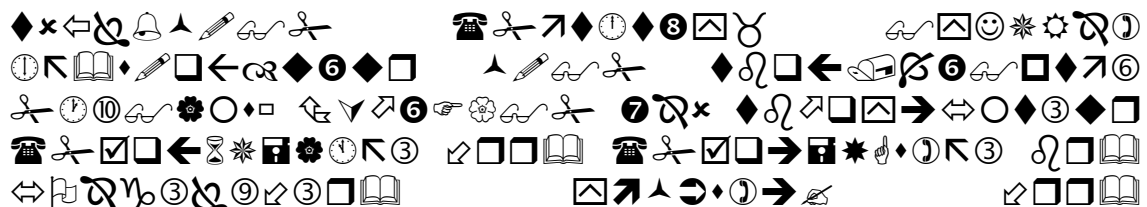
Sedangkan dalam dalam fiqih jinayah pelaku pencurian itu diancam dengan hukuman had (potong tangan) seperti yang temuat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:.



Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴²

Kemudian terdapat juga ancaman Hukuman Pencurian kubra (Perampokan)

dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33.



⁴¹. Ibid.

⁴². Departemen Agama RI, *Op.Cit* h. 114

Dalam Islam seseorang baru dikenakan sanksi potong tangan (sanksi pokok) dalam pencurian ringan adalah apabila memenuhi syarat-syarat baik syarat subjek maupun syarat objek. Adapun syarat tersebut adalah:

1. Syarat subjek, yang dimaksud syarat subjek adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh para pelaku pencurian yaitu:
 - a. Balig.
 - b. Berakal.
 - c. Atas kemauan sendiri.
 - d. Mengetahui perbuatan itu dilarang.⁴⁶
2. Syarat objek, adalah syarat yang ada pada barang yang diambil yang terdiri dari:
 - a. Barang yang diambil milik orang lain.
 - b. Barang yang diambil bernilai dalam pandangan syara’
 - c. Mencapai nisab.
 - d. Barang atau harta yang bergerak.
 - e. Barang pada tempat penyimpanan.⁴⁷

Disamping harus memenuhi syarat subjek dan objek untuk dikenakan hukuman potong tangan dalam melakukan tindak pidana pencurian harus juga terpenuhi alat-alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi.

⁴⁶ .Prof. Dr. H. Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafaika, 2007), h. 66

⁴⁷ . *Ibid.* h. 67

2. Pengakuan, dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
3. Sumpah, dikalangan mazhab syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajih, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
4. Qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mencuri.⁴⁸

3. Kasus Pencurian Pada Perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR

Kasus pencurian ini terjadi pada hari selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib. tepatnya di jalan Sisingamangaraja dekat depan rumah makan putra semarang pekanbaru, siterdakwa yaitu Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil dompet warna hitam merek Sophie martin yang berada di dalam keranjang sepeda motor saksi (kimco), dan selanjutnya pelaku melarikan diri kearah jl. Kuantan II dan saksi pun ikut mengejarnya dan sambil berteriak jambret..jambret...dan pelakupun terus menggas sepeda motornya dan saksi terus megejarnya sehingga warga yang mendengar teriakan saksi "maling-maling..jambret juga ikut megejarnya, lalu saat di jl. Tanjung Karang pelaku disepak oleh warga yang mengejar dan megenai Sepeda motor pelaku dan sepeda motor dari pelaku merasa oleng terjatuhlah pelaku lalu pelaku sempat melarikan diri kearah jl. Sudirman dan ditangkap warga.

⁴⁸. Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Op.Cit*, h. 80

Akibat perbuatan terdakwa Agus Mulyadi Saksi korban Age Laksi mengalami kerugian sebesar 250.000 atau setidaknya tidaknya lebih dari 250.000 dan perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun dan denda sebanyak 900-

D. Macam – Macam Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Macam-macam Pencurian

Dalam Hukum positif Tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian biasa, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau pencurian berat, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.⁴⁹

Sedangkan Pencurian dalam pandangan fiqh jinayah itu ada dua macam, yaitu:

1. Pencurian ringan
2. Pencurian berat

⁴⁹. Prof. Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 128

Abdul Qadir Audah di dalam buku hukum pidana Islam yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengemukakan pencurian ringan adalah “*mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi*”.⁵⁰ Sedangkan pencurian berat adalah “*mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan*”. dalam pencurian berat ini sering di kenal dengan istilah perampokan.⁵¹

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelannya, disamping terdapat unsur kekerasan.

Kemudian di samping ada pencurian ringan dan pencurian berat, terdapat lagi pencurian yang bisa dikenakan hukuman *had* potong tangan dan yang dikenakan hukuman ta’zir. Pencurian yang dikenakan hukuman *had* potong tangan adalah pencurian yang memenuhi semua unsur-unsur dalam pencurian dan syarat-syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan, yaitu syarat subjek dan objek. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan maka dikenakan hukuman ta’zir. Termasuk juga pencurian yang tidak mempunyai unsur yang sama dengan pencurian yang akan dikenakan hukuman potong tangan, yang dalam hal ini : seperti mencopet, mengutil, jambret.

⁵⁰. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 81

⁵¹. *Ibid.* h. 82

b. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum positif terdapat beberapa unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum pada kasus pencurian tersebut, yaitu:

a. Barang siapa.

Bahwa kata barang siapa tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan dalam kitab Undang-undang yang berlaku.

b. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya.

c. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hak adalah terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya.⁵²

Kemudian dalam fiqih jinayah juga terdapat unsur-unsur pencurian, yaitu:

a. Pengambilan secara diam-diam.

pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.

⁵². R. Soenarto Soerodibroto, S.H. *Loc. Cit.*

b. Barang yang diambil berupa harta.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai (harta). Apabila yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman.

c. Harta tersebut milik orang lain.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian ini, yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain.⁵³

d. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

⁵³. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* h. 87

BAB IV

PELAKSANAAN HUKUM ACARA PIDANA PADA KASUS

PENCURIAN NO. 247/PID/B/2011/PN/PBR

A. Pemeriksaan

Ada berapa langkah dalam melakukan proses pemeriksaan pada kasus tindak pencurian No.247/Pid/B/2011/PN/PBR ,yaitu diantaranya adalah tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pembuktian dan putusan.

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹

Dalam hal ini berdasarkan laporan yang telah dilakukan oleh sikorban yang bernama Age Laksi Dwi Riki Narosa kepada polsek Pekanbaru korban menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib. Saat saksi baru mengantarkan adiknya di jl. Dr. Setiabudi dan kemudian saksi pulang melalui jalan Sisingamangaraja dekat depan rumah makan putra semarang Pekanbaru, saksi diikuti seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan memepet saksi dan langsung mengambil dompet warna hitam merek Sophie martin yang berada di dalam keranjang sepeda motor saksi (kimco), dan selanjutnya pelaku melarikan diri kearah jl. Kuantan II dan saksi pun ikut

¹. Drs. M. Marwan, S.H dan Jimmy P. SH.. *Op. Cit*,h. 504

mengejarinya dan sambil berteriak jambret..jambret...dan pelakupun terus menggas hondanya dan saksi terus megejarnya sehingga warga yang mendengar teriakan saksi “maling-maling..jambret juga ikut mengejar, lalu saat di jl. Tanjung Karang pelaku disepak oleh warga yang mengejar dan mengenai sepeda motor pelaku dan sepeda motor dari pelaku merasa oleng terjatuhlah pelaku lalu pelaku sempat melarikan diri kearah jl. Sudirman dan ditangkap warga.

Atas dasar laporan sikorban yang bernama Age Laksi tersebut kepada Polsek Pekanbaru maka polsek Pekanbaru melakukan penyitaan barang bukti pertama berupa dompet Merek Sophie martin milik korban yang bernama Age Laksi Dwi Rizki dan yang kedua sepeda motor milik pelaku yaitu milik Agus Mulyadi. Untuk kepentingan penyidik tentang tindak pidana tersebut maka penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Agus Mulyadi Alias Agus Bin Syahrial yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian biasa dengan cara menjambret sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP pidana yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari 2011.

Selanjutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Agus Mulyadi dengan surat perintah penahnan Nomor: Sp. Han /09/ II /2011 Reskrim, dengan pertimbangan tersangka di khawatirkan akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, karena Agus Mulyadi Alias Agus bin Syahrial di duga keras

melakukan tindak pidana pencurian (jambret) penahanan dilakukan selama 21 hari(dua puluh satu hari) terhitung dari tanggal 23 Pebruari – 14 Maret 2011.

Guna melanjutkan penyidikan pihak penyidik melakukan panggilan sebagai berikut:

- a. Karena pelapor sudah datang dengan sendirinya melapor maka pihak penyidik tidak memanggil lagi akan tetapi penyidik meminta keterangan kepada sikorban yang bernama Age Laksi untuk memberikan keterangan secara lengkap, dalam hal ini sikorban memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya.
- b. Setelah mendengar keterangan dari saksi pertama dari korban, kemudian juga penyidik memanggil saksi yang kedua yang bernama Reymon Basir untuk diminta keterangannya secara lengkap juga, saksi kedua menerangkan, bahwa pada hari selasa tanggal 22 pebruari 2011 sekira pukul 15.45 Wib sewaktu saksi II melintas pada jalan Tanjung Karang Pekanbaru, saksi II melihat seorang perempuan berteriak jambret sambil mengendarai sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian terhadap laki-laki yang diteriaki jambret terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan berlari kearah sudirman Pekanbaru dan selanjutnya terhadap laki-laki tersebut ditangkap oleh masyarakat didepan kantor bea cukai Pekanbaru.
- c. Kemudian selain penyidik meminta keterangan dari saksi kedua, penyidik juga memanggil saksi ketiga yang bernama Desi Fatmawati

untuk dimintai keterangannya juga secara lengkap, dan saksi ketiga menerangkan bahwa pada hari Selasa sekira pukul 15.45 Wib. Sewaktu saksi III sedang berada diwarung miliknya saat duduk dibangku sambil berjualan, saksi III melihat di jalan Tanjung Karang depan warung, 3 (Tiga) unit sepeda motor saling kejar-kejaran yang mana berada di posisi paling depan dikendarai salah seorang laki-laki yang tidak saksi III kenal menggunakan sepeda motor warna merah-hitam dan saksi III tidak tahu nomor polisinya, sedang 2 (dua) unit sepeda motor lainnya berada di belakang dikendarai 1 (satu) orang anak perempuan menggunakan pakaian sekolah dan satunya lagi dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi III kenal, ternyata laki-laki yang menggunakan sepeda motor merah-hitam berhasil dikejar 2 orang laki-laki yang tidak dikenalnya hingga terjatuh kira-kira kurang lebih 15 meter dari warung saksi III dan laki-laki itu lari menuju jalan Sudirman meninggalkan sepeda motornya sambil diteriaki jambret oleh 2 orang laki-laki tersebut, sehingga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal saksi III ikut mengejar laki-laki itu dan berhasil ditangkap di depan mesjid Al-Islah lalu laki-laki itu dipukuli masa dan saksi III kembali kewarung untuk berjualan.

Untuk melengkapi keterangan dari penyidik penulis juga melakukan wawancara kepada korban dan sekaligus posisinya sebagai saksi yaitu Age Laksi Dwi Rizki. Tentang bagaimana Agus Mulyadi

dalam melakukan aksi kejahatannya. Dalam hal ini dinyatakan oleh responden bahwa korban pada mulanya diikuti oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan memepet saksi dan langsung mengambil dompet warna hitam merek Shophie Martin dengan tangan kananya yang berada dalam keranjang sepeda motor (kimco).²

Setelah penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada tersangka:

Nama : Agus Mulyadi Alias Agus bin Syahrial
 Umur : 27 Tahun
 Pekerjaan : Tidak ada
 Agama : Islam
 Kewarga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Sago, No. 83 Kec. Senapelan, Pekanbaru

Hasil dari pemeriksaan penyidik terhadap tersangka penyidik mengambil kesimpulan bahwa, tersangka pada umumnya menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tersangka tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana maupun perdata serta tidak pernah dihukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan didukung oleh keterangan saksi, serta adanya barang bukti bahwa tersangka benar telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menjambret.³

². Age Laksi Dwi Rizki, Saksi/Korban, *Wawancara*, Tanggal 22 April 2012 .

³. Brigadir Pirdaus Lubis dan Jefri Brifka, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2012.

Dalam hal ini juga penulis melakukan wawancara terhadap siterdakwa yaitu Agus Mulyadi alias Agus bin Syahril, penulis bertanya apakah dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menjambret itu ada unsur pemaksaan atau dasar kemauan sendiri. Dalam hal ini dinyatakan oleh responden bahwa dalam melakukan penjambretan tersebut atas kemauannya sendiri tidak ada paksaan dari manapun.

Atas dasar itulah maka tersangka dapat disangka telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 KUHP pidana.⁴

2. Tahap Penuntutan

Penuntutan yaitu suatu tindakan untuk menuntut kembali atas barang yang di kuasai orang lain tanpa hak.⁵ Dan dalam kasus perkara pidana ini tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada dari hasil dari penyidikan, kemudian dilimpahkan kepada hakim untuk memeriksanya dan memetuskannya.

Tahap penuntutan ini adalah tahap yang kedua dari proses penyelesaian perkara kasus yang dilakukan oleh Agus Mulyadi terhadap Age Laksi, kemudian tahap penuntutan ini dilimpahkan kepada pengadilan negeri Pekanbaru oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sebuah dompet kulit warna hitam yang dilakukan oleh Agus Mulyadi alias Agus bin Syahril adalah sebagai surat dakwaan yang dibuat oleh kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan No. Reg. Perkara : PDM- 106 / Pekan / 03 / 2011, dengan T.

⁴. Agus Mulyadi Alias Agus Bin Syahril, *Wawancara* , Tanggal 28 April 2012

⁵. Drs. Marwan, SH. Dan Jimmy P.SH. *Op. Cit.* h. 503

Harly Mulyatie, SH. Nip. 197903282003122005 sebagai jaksa penuntut umum yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Terdakwa Agus Mulyadi Alias Agus bin Syahrial berdasarkan surat penetapan Hakim majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 6 April 2011 No. 247/ Pid . B/ PN / PBR. Telah di hadapkan kedepan sidang pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Sebagaimana diuraikan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Agus Mulyadi Alias Agus Bin Syahrial pada hari Selasa bulan Pebruari 2011 di Jl. Sisingamangaraja dekat depan rumah makan Putra Semarang Pekanbaru telah melakukan tindak pidana pencurian.

Adapun cara melakukan tindak pidana pencurian dompet tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib. Saat saksi baru mengantarkan adiknya di jl. Dr. Setiabudi dan kemudian saksi pulang melalui jalan Sisingamangaraja dekat depan rumah makan putra Semarang Pekanbaru, saksi diikuti seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan memempet saksi dan langsung mengambil dompet warna hitam merek Sophie martin yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 50.000 yang berada di dalam keranjang sepeda motor saksi (kimco), dan akibat perbuatan terdakwa Agus Mulyadi als Agus bin Syshrial saksi korban Age Laksi Dwi Rizki mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman menurut pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsider :

Sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Agus Mulyadi Als Agus Bin Syahrial pada hari Selasa 22 Pebruari 2011 telah melakukan tindak pidana pencurian. Adapun cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah; Selasa tanggal 22 pebruari 2011 sekitar pukul 15.00 WIB telah mengambil sesuatu barang, berupa satu buah dompet warna hitam merk sophie, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat korban mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa mengikuti dari belakang mendekati sepeda motor si korban tersebut dari arah samping kiri, dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil dompet yang berada di keranjang sepeda motor si korban dan terus melaju ke arah Jl. Tanjung sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh massa.⁶

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara terhadap jaksa penuntut umum Pekanbaru yang dijadikan responden yaitu: T. Harly Mulyatie, tentang bagaimana penerapan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana Pencurian di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam hal ini dinyatakan oleh responden bahwa Penerapan pasal 362 KUHP dalam perkara tindak pidana pencurian sebuah dompet di Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan

⁶. Dokumen Surat Dakwaan Jaksa, Tahun 2011, h. 1.

dakwaan primer, jaksa penuntut umum mengemukakan unsur-unsur dari pasal 362 KUHP tersebut antara lain:

a. Unsur Objektif

Bahwa barang ini harus benar - benar berasal dari suatu kejahatan dan harus terbukti ada terjadinya suatu kejahatan misalnya kejahatan pencurian, yang termasuk kepada unsur-unsur objektif ini ialah:

Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maka penulis berpendapat unsur objektif yang telah dilakukan terdakwa adalah telah mengambil barang tanpa seizin orang yang punya barang dengan cara melawan hukum.

b. Unsur Subjektif

Ada satu unsur alternatif mengenai jalan pikiran atau perasaan pelaku kejahatan pencurian: yaitu Tahu (Opzet). Berdasarkan pengakuan terdakwa maka jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa sudah memenuhi unsur – unsur opzet, bahwa terdakwa telah mengambil barang dengan cara melawan hukum.

Karena pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dapatlah dikatakan semua unsur – unsur pada pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti yang mana terdakwa telah melakukan pencurian sebuah dompet kulit warna hitam.

Berdasarkan unsur – unsur dari pasal 362 KUHP telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP tentang ditemukan alat bukti, yaitu lebih dari dua alat bukti. Pengakuan terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam, selanjutnya keterangan saksi, alat bukti yang ditemukan ini sudah sesuai dengan pasal 184 KUHP yaitu yang berbunyi :

“Alat Bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.⁷

3. Tahap pemeriksaan dan Pembuktian

Pemeriksaan yang dimaksud di sini ialah suatu perbuatan memeriksa suatu proses atau usaha penyidikan.⁸ Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh seorang hakim dalam melakukan pemeriksaan di suatu persidangan antara lain: Pemeriksaan seluruh saksi, pemeriksaan terdakwa.

1. Tahap pemeriksaan

Langkah-langkah dalam Tahap pemeriksaan ini yang dilakukan oleh pihak pengadilan pada kasus tindak pidana pencurian No. 247/Pid/B/2011/Pbr ini adalah:

1. Pemeriksaan seluruh saksi.

⁷. T. Harly Mulyatie, SH, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2012

⁸. Drs. Marwan, SH. Dan Jimmy P.SH. *Op. Cit.* h.497

Pemeriksaan seluruh saksi yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada semua saksi di persidangan dalam perkara perdata maupun pidana, baik yang diajukan tergugat maupun tergugat.⁹

Dalam tahap pemeriksaan ini dalam persidangan pengadilan dimulai dengan acara pemeriksaan saksi yang kesemuanya terdiri dari dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa terdakwa yang bernama Agus Mulyadi alias Agus Bin Syahrial sudah melakukan pencurian dengan cara menjambret.

2. Pemeriksaan terdakwa

Pemeriksaan sementara yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana.¹⁰ Setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada dua orang saksi, majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang bernama Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial, dalam pemeriksaan tersebut majelis hakim bertanya kepada terdakwa:

- a. Hakim bertanya tentang identitas terdakwa, yang ditanyakan hakim dalam pemeriksaan tersebut adalah: Nama lengkap terdakwa, Umur, Pekerjaan, Agama, kewarga Negara, Alamat.
- b. Setelah Hakim bertanya tentang identitas kepada terdakwa, selanjutnya hakim mendengarkan pembelaan dari terdakwa terdakwa sendiri tidak didampingi oleh penasihat hukum,

⁹. *Ibid.*

¹⁰. *Ibid*

menyatakan bahwa telah mengerti dan menyatakan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dijatuhi hukuman seingan-ringannya

2. Tahap Pembuktian.

Pembuktian adalah suatu usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.¹¹ Dalam tahap pembuktian ini yang dilakukan oleh pihak pengadilan, hakim meminta alat-alat bukti untuk memperkuat pembuktian secara sah dalam persidangan tersebut. Adapun yang menjadi barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah – hitam dengan BM 5918 JT dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Shopie Martin telah diajukan kepersidangan telah disita menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian secara sah dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut mengemukakan bukti dari unsur pasal yang di langgar oleh perbuatan terdakwa yaitu pasal 362 KUHP.

Adapun unsur – unsur dari pasal 362 KUHP tersebut sebagai berikut:

¹¹. *Ibid.* h. 496

1. Barang Siapa

Yang dimaksud kata barang siapa tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan dalam kitab undang-undang yang berlaku.

Bahwa dari keterangan saksi – saksi terdakwa dan adanya barang bukti serta dengan identitas terdakwa ternyata terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkannya atas suatu peristiwa pidana, maka jelaslah unsur pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Mengambil Suatu Barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya. Bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan:

- a. Bahwa pada hari Selasa 22 Februari sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jln. Sisingamangaraja depan rumah makan Putra Semarang Pekanbaru, terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, adapun sarana yang digunakan terdakwa menggunakan sepeda motor.

- b. Terdakwa mengambil dompet tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu Age Laksi Dwi Rizki, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Age mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dari uraian – uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya,

Adapun, terdakwa dalam mengambil dompet yang terletak dikeranjang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah dompet tersebut berhasil diambilnya terus melaju ke arah jalan tanjung karang, sampai akhirnya terdakwa ditangkap massa. Berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa seluruh unsur–unsur dari dakwaan melanggar pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian (jambret). Berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapus hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan

pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan perbuatannya.

Adapun hal – hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Adapun hal – hal yang meringankan terdakwa adalah:

- a. Bahwa terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan.
- b. Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan serta tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari pencurian tersebut.

Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Agus Mulyadi Als Agus Bin Syahrial, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Agus Mulyadi Als Agus bin Syahrial dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- c. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Sophie martin yang berisikan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dikembalikan kepada Age Laksi Dwi Rizki. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah – hitam dengan No. pol BM 5918 JT dikembalikan kepada terdakwa.
- d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000- (Tiga Ribu Rupiah)

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 27 April 2011. Itulah tanggapan penuntut umum, yang dibacakan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum,, tertanggal 30 Maret 2011 oleh Jaksa Penuntut Umum T. Harly Mulyati, SH.¹²

Untuk melengkapi keterangannya yang diberikan oleh jaksa penuntut umum penulis juga melakukan wawancara terhadap Hakim pengadilan Negeri Pekanbaru yang dijadikan responden yaitu : Syaiful Azwir, SH, Poltak Pardede, SH, Pasti Tarigan, SH. Tentang bagaimana pemeriksaan pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dalam suatu tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam hal ini dinyatakan oleh responden bahwa pemeriksaan dari pasal 362 KUHP di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah berpedoman pada surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum , yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan

¹². Dokumen Tuntutan Pidana, Th. 2011, 1-3

perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dikatakan juga bahwa seseorang baru dapat dikatakan terdakwa pencurian apabila telah diperiksa oleh penyidik, jaksa dan seterusnya Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dimana jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdakwa betul telah melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Majelis hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan berpedoman kepada pasal 362 KUHP, dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 152 samapai pasal 155 kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri.¹³

Pelaksanaan pemeriksaan dan pembuktian perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr didahului pula dengan pelimpahan perkara yang bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, lalu ketua pengadilan menunjuk tiga orang hakim yang menyidangkan perkara tersebut yaitu:

1. Syaiful Azwir, SH selaku Hakim Ketua
2. Poltak Pardede, SH selaku Hakim Anggota
3. Pasti Tarigan, SH, MH selaku Hakim Anggota

Kemudian majelis hakim menetapkan hari sidang, selanjutnya menyatakan sidang terbuka untuk umum, selanjutnya mendengarkan keterangan saksi dan mengemukakan alat- alat bukti yang diajukan pada

¹³. Syaiful Azwir, *Loc.Cit.*

terdakwa dan lain sebagainya dalam rangka pemeriksaan dan pembuktian perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, tepatnya pasal 152 sampai dengan pasal 202.

4. Tahap Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dnganhukum.¹⁴

Dalam tahap keputusan ini yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Setelah memperhatikan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah mendengarkan keterangan dari saksi – saksi, yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan dimuka persidangan , setelah memperhatikan barang bukti telah mendengar pengakuan terdakwa dimuka persidangan, kemudian juga setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian lagi memperhtikan pula nota pembelaan terdakwa, kemudian ditambah lagi memperhatikan unsur–unsur pasal 362 KUHP, maka majelis hakim memutuskan terdakwa dengan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agus Mulyadi Alias Agus Bin Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

¹⁴. Drs. Marwan, SH. Dan Jimmy P.SH. *Op. Cit.* h. 517

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie martin yang berisikan uang tunai sebanyak Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah). Di kembalikan kepada saksi Age Laksi Dwi Rizki dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah-hitam dengan No. Pol BM 5918 JT.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah putusan pengadilan negeri pekanbaru terhadap perkara No. 247/Pid/B//2011/PN/Pbryang dibacakan hari senin tanggal 02 Mei 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun mejelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut adalah:

1. Saeful Azwir, SH selaku Hakim Ketua.
2. Poltak Pardede SH selaku Hakim Anggota.
3. Pasti Tarigan, SH,MH selaku Hakim Anggota.
4. Joko Ciptanti, SH selaku PaniteraPengganti.

Kemudian dihadiri juga oleh Jaksa penuntut umum yaitu T. Harly Mulyatie, SH , serta para saksi-saksi, korban dan pelaku.

Keputusan yang diputuskan oleh hakim pengadilan tersebut juga telah mempertimbangkan hal-hal yang bisa menjatuhkan hukuman dan juga hal-hal yang bisa meringankan hukuman.

Adapun hal yang bisa dijatuhi hukuman terhadap terdakwa adalah karena perbuatannya meresahkan masyarakat atau merugikan orang lain. Kemudian juga yang dapat meringankan hukumannya adalah

1. Bahwa terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan.
2. Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.¹⁵

Kalau kita lihat dalam fiqih jinayah (Pidana Islam) setiap orang yang melakukan jarimah (tindak pidana) juga diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam suatu negara yang menerapkan hukum pidana Islam di negaranya. Ketentuan tersebut bisa saja sama atau berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana positif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sesuai dengan KUHAP yang berlaku. Hal ini disebabkan, karena di dalam syari'at Islam tidak ada nash-nash yang mengatur tentang hukum acara pidana Islam seperti yang diatur dalam hukum acara pidana positif yang berlaku di Negara Indonesia

¹⁵. Salinan Putusan, *Loc.Cit*

B. Penentuan Sanksi

Dalam penentuan sanksi pada kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr ini tentang pencurian yang dilakukan oleh Agus Mulyadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan cara penjabretan tersebut berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut umum terdakwa di jerat dengan pasal 362 KUHP. Dalam tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut yang berisikan supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Agus Mulyadi Als Agus Bin Syahrial, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Agus Mulyadi Als Agus bin Syahrial dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Sophie martin yang berisikan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dikembalikan kepada Age Laksi Dwi Rizki. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah – hitam dengan No. pol BM 5918 JT dikembalikan kepada terdakwa.
- d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000- (Tiga Ribu Rupiah)

Dalam fiqih jinayah tindak pidana pencurian adalah suatu bentuk tindak pidana yang di kelompokkan pada jarimah *hudud* yang yang ketentuan sanksinya

*suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*¹⁷

C. Pemutusan Hukuman

a. Keserasian Keputusan dengan Ancaman Hukuman

berhubungan dengan keputusan yang diputuskan oleh seorang hakim dalam perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR, terdakwa yang bernama Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah yaitu melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP yang diancam hukumannya adalah selama-lamanya 5 Tahun atau denda sebanyak Rp.900 (Sembilan ratus rupiah).

Akan tetapi dalam hal ini, hakim tidak memutuskan hukuman kepada terdakwa Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial dengan ketentuan pasal 362 KUHP yang diancam hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara atau denda Rp. 900 melainkan menjatuhkan hukuman dengan 7 bulan penjara dengan beberapa pertimbangan yaitu: terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan, terdakwa menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum dan berkelakuan baik dalam persidangan.

Apabila kita tinjau dalam fiqih jinayah tindak pidana pencurian adalah suatu bentuk tindak pidana yang di kelompokkan pada jarimah *hudud* yang

¹⁷. *Ibid. h.* 115

sanksinya telah ditentukan dalam nash yaitu potong tangan, selain itu ada lagi perampokan yang sanksinya juga telah ditentukan dalam nash, mengenai surat dan ayat tentang pencurian tersebut adalah (*Al-Maidah ayat 38*), sedangkan tentang perampokan (*Al-maidah ayat 33*).

Akan tetapi ada jarimah yang bentuknya hampir mirip dengan pencurian di atas akan tetapi ia dikelompokkan kedalam jarimah *ta'zir* yang sanksinya juga *ta'zir* seperti mencopet, menjambret mengutil dan lain sebagainya. Masing-masing jarimah ini memiliki unsur-unsur khususnya. Unsur khusus inilah yang akan membedakan jenis jarimah yang satu dengan yang lainnya dan sekaligus akan memberikan perbedaan pada sanksinya.

Kemudian dari pada itu bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut yang akan dijatuhi hukuman pokok pencurian baik pencurian yang dikelompokkan pada jarimah *hudud* maupun jarimah *ta'zir* harus memenuhi syarat-syarat baik syarat pada subjek maupun pada objek. Apabila tidak terpenuhi syarat pada subjek maupun syarat pada objek maka pelaku bisa tidak dikenakan hukuman atau bisa diganti dengan hukuman yang lain. Inilah hal-hal yang bisa menggugurkan hukuman atau hal-hal yang bisa mempengaruhi hukuman, seperti yang menggugurkan hukuman antara lain adalah pelakunya gila, terpaksa dan lain-lain. Dan yang mempengaruhi hukuman adalah barang yang diambil tidak mencapai nisab, barang yang diambil tidak pada tempatnya dan lain-lain.

Jadi dalam hal ini siterdakwa yang bernama Agus Mulyadi yang dijatuhi hukuman selama 7 bulan itu kalau kita lihat dalam pandangan jinayah (pidana Islam) penulis bisa mengelompokannya kedalam *jarimah ta'zir* sebab barang yang diambilnya itu bukan secara diam-diam, kemudian tidak pada tempat penyimpana dan juga tidak ada unsur kekerasan namun dalam hal ini si terdakwa melakukannya ketika korban dalam keadaan lengah, maka dari itu penulis memasukan kedalam jarimah *ta'zir* yang mana perbuatan tersebut identik dengan istilah pencopetan atau penjambretan. Karena dia termasuk kedalam kelompok jarimah *ta'zir* maka hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Jadi menurut hemat penulis keputusan pada kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR tentang pencurian di Pengadilan Negeri ini dalam pandangan jinayah sudah sesuai/serasi dengan ancaman hukuman yang telah ada karena diserahkan kepada penguasa atau hakim, bisa saja hakim memutuskan mengenai sanksinya itu berupa penjara ataupun berupa ganti rugi, dalam hal ini penguasa atau hakimlah yang berhak mengaturnya.

b. Alasan Pemutusan Hukuman

Dalam kasus pencurian No. Pekara 247/Pid/B/2011/PN/Pbr yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Agus Mulyadi alias Agus bin syahrial yang dijatuhi hukuman selama 7 bulan penjara itu ada beberapa alasan:

- a. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan

meyakinkan maka siterdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian.

- b. Kemudian jaksa penuntut umum tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan perbuatannya..
- c. Bahwa terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan.

Begitu juga dalam pandangan fiqih ijnyah apabila sipelaku jarimah telah terbukti bersalah dan tidak ada yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana, kemudian telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam untuk dikenakan hukuman kepada sipelaku jarimah pencurian. Seperti memenuhi syarat objek dan subjek maka dapat dikenakan hukuman pokok (potong tangan), dan apabila tidak memenuhi salah salah satu syarat baik objek maupun subjek yang telah penulis paparkan dalam bab III maka sipelaku jarimah pencurian tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk memberikan hukumannya. bisa saja hakim memutuskan mengenai sanksinya itu berupa penjara sekian tahun/bulan ataupun berupa ganti rugi

D. Kelemahan Dan Ketepatan hukum Acara Pidanaa dalam Kasus No. 247/Pid/B/2011PN/PBR

a. Kelemahan

Salah satu kelemahan hukum acara pidana pada kasus No.247 ini kalau kita lihat yaitu masalah putusan hakim yang ditetapkan pengadilan, maka sebagaimana telah penulis paparkan pada bagian terdahulu, bahwa kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR yang diputuskan oleh pengadilan Negeri pekanbaru positif tindak pidana pencurian. Dimana hak pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menghukum terdakwa atau pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman 7 bulan dan membayar biaya perkara Rp.3000. Hukuman dijatuhkan oleh hakim pengadilan Negeri Pekanbaru kepada terdakwa Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial. Bila kita perhatikan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan bahkan tidak memberatkan diri pelaku.

Sedangkan kalau kita lihat tujuan dari hukuman dalam Islam adalah pencegahan, maka besarnya harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.¹⁸

Selain mencegah dan menakut-nakuti pelaku, syari'at Islam tidak lain untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pelaku. bukan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama.

¹⁸. *Ibid*, h. 256

Sehingga penjauman manusia terhadap kejahatan bukan karena takut akan hukum, melainkan karena kesadaran diri akan kebencian terhadap kejahatan.¹⁹

b. Ketepatan Hukum Acara Pidana dalam Kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/Pbr

Secara umum pelaksanaan tahap penyidikan serta penuntutan, pemeriksaan dan pembuktian perkara serta putusan kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR sudah tepat dengan hukum acara pidana yang ada. Yang mana disebutkan bahwa hakim tidak boleh memberikan hukuman yang lebih dari pasal pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama Sembilan bulan penjara. Hal ini berarti putusan hakim pengadilan negeri pekanbaru tidak melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan kutipan di atas terutama mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dikaitkan dengan tujuan hukuman dan hukum acara pidana itu sendiri adalah untuk mencari si pelaku tindak pidana yang sebenarnya guna membuktikan apakah seseorang itu terbukti bersalah atau tidak, supaya tidak terjadi salah tangkap, salah tuntutan dan salah menghukum orang, guna membuat jera si pelaku.²⁰ Jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian sebagaimana terlampir pada perkara No.247/Pid/B/2011/PN/PBR sesuai dengan bunyi pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang

¹⁹. *Ibid.* h. 257

²⁰. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1989), h. 32

menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti.

Kemudian dari penyajian yang penulis lakukan juga terhadap catatan tentang penyelesaian kasus No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR, kalau kita lihat dalam proses penyelesaiannya pada kasus tersebut unsur-unsur pemeriksaannya sudah memenuhi standar hukum jinayah, yaitu adanya pelaku dengan niat sengaja, adanya saksi yang menyaksikan secara langsung , kemudian adanya pengakuan terdakwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada bab V ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas yaitu:

1. Pidana dalam hukum positif adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman, kemudian dalam fiqh jinayah pidana dikenal dengan istilah jarimah yaitu orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Islam.
2. Kemudian dasar hukum tentang pidana ini dalam hukum positif terdapat dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam fiqh jinayah terdapat dalam (Surat *Al-Qashash* ayat 77 dan Surat *Bani Isroil* ayat 15).
3. Dalam fiqh jinayah pencurian ada dikelompokkan kedalam jarimah hudud dan ada dikelompokkan pada jarimah ta'zir, yang dikelompokkan pada jarimah hudud adalah pencurian itu sendiri dan perampokan, sedangkan yang dikelompokkan pada jarimah ta'zir adalah jambret, copet dan lain-lain. Dalam hukum positif tidak mengenal pengelompokan-pengelompokan seperti ini. Yang dikenal adalah pencurian ringan, pencurian biasa dan pencurian berat. Pencurian dalam fiqh jinayah

diartikan pengambilan barang oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal sehat secara diam-diam di tempat penyimpanan. Sedangkan dalam hukum positif pencurian diartikan pengambilan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. .

4. Dalam proses penyelesaian kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR, kalau kita lihat dalam proses penyelesaiannya pada kasus tersebut unsur-unsur pemeriksaannya sudah memenuhi standar hukum jinayah, yaitu adanya pelaku, dengan niat sengaja, adanya saksi yang menyaksikan secara langsung , kemudian adanya pengakuan terdakwa adapun sekiranya hakim menetapkan hukuman dengan penjara 7 bulan penjara kepada terdakwa itu adalah bagian dari ijtihad.
5. Mengenai keputusan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kasus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Agus Mulyadi alias Agus bin Syahrial yang di kenakan hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara dalam pandangan fiqih jinayah (pidana Islam) bisa diterima/sesuai karena, pencurian yang dilakukan Agus Mulyadi ini adalah pencurian yang dimasukan kedalam kelompok jarimah *ta'zir* yang dikenal dengan istilah mencopet atau menjambret. Di mana sanksinya tidak ditentukan di dalam nash akan tetapi ditentukan oleh penguasa/hakim. jadi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ini sesuai dalam pandangan fiqih jinayah, sanksinya

bisa lebih besar dari pada 7 (tujuh) bulan atau bisa juga sanksinya lebih kecil dari pada 7 (tujuh) bulan. Atau bahkan bisa dalam bentuk ganti rugi (diat / denda). Dan dari hasil keputusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kasus perkara No. 247/Pid/B/2011/PN/PBR sudah bisa di katakan mencerminkan keadilan dan ketepatan hukum, karena dalam memutuskan hukuman tersebut kepada terdakwa hakim dalam melakukan pemeriksaannya itu berdasarkan beberapa pertimbangan dan unsur-unsur pidana yang ada sehingga menghasilkan sebuah keputusan.

B. SARAN-SARAN.

Berdasarkan penelitian tentang kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas, maka pada gilirannya penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak diantaranya:

1. Pada penegak hukum diharapkan agar tetap berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta baiknya nilai lembaga pengadilan di mata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pencurian yang terbukti secara hukum tanpa memandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa aman dalam masyarakat.

2. Pada pelaku agar mendapat pelajaran dari kasus yang dihadapi, agar untuk yang akan datang tidak mengulangnya lagi.
3. Pada masyarakat disarankan untuk menghindari perbuatan atau perikatan yang dilakukan dengan jalan yang tidak normal, agar masyarakat selalu menduga bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tidak wajar, adalah merupakan perbuatan kejahatan. Dengan selalu waspada maka akan memperkecil adanya tindak kejahatan pencurian dalam bentuk apapun sehingga akan tercipta keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Jaenudin , *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grfika, 2006)
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Penerjemah,Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Cholis M. Nasir, *Fiqih jinayah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000)
- Chazawi Adamin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Dzajuli Ahmad H, *Fiqih jinayah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2000)
- Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006)
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Doi'I, A.Alawi , *Penjelasan Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raa Grafindo Persada, 2002)
- Djalil H. A. Basiq, *Pengadilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2006).
- Farid Abidin A .Z. dan Hamzah A., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Hamzah Ahmad, Ananda Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: fajar Mulya 1996).
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Fustaka Setia, 2000)
- Hanafi Ahmad, *pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- H Abdullah. Rozali, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Hamzah Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Sinar Grafika, 1996)

H Abdullah. Rozali, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Hamzah Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Sinar Grafika, 1996)

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah, Muhammad Yasir Abdul Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Jonkers J. E. Mr, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1997)

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005)

-----, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2004)

Politaia, 1988)

Marwan, M. Dan P Jimmi, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009)

Munawwir Warson Ahmad, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

Nasution Kasim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Jambatan, 1984)

Rusd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, M.A. Abdurahaman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), jilid x,

-----*Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, A. Haris Abdullah, (Semarang, CV. Asy-Syifa, 1990) Jilid 3.

-----*Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Abu Usamah Fahtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Jilid 2

Rahman, A, *Penjelasan lengkap Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan kemasyarakatan, 1992).

Salim, Rasyid Abd, *Syarah Bulughul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), Jilid 3,

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Subekti R, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : Pradnya Pramita, 1987),

- Soesilo R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Komentarnya*, (Bogor : Pelita, 1998)
- Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Santoso Ananda Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: fajar Mulya 1996)
- S. Tanusubroto Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Jakarta: libertif, 1988)
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insanai Ress, 2003)
- Soerodibroto R. Soenarto, S.H, *KUHUP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).
- Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara pidana, dan Perdata*, (Jakarta: Trasnmedia Fustaka, 2008)
- Salam, Faisal. ***Peradilan Militer Indonesia***, (Bandung: Mandar Majunad, 1997)
- Tanusubroto, S, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Armico, 1998),
- Poernomo Bambng, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Bandung: Armico, 1983)
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1989)
- Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Jakarta: libertif, 1988)
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984)
- Prasetyo Teguh *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Yafie Alie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma, 2007)
- Waluyo Bambang, SH, *Pidana danPidanaaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)